

LAPORAN NOTULA

Audiensi Setnas OGI Kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Kementerian PPPA)

Jumat, 31 Maret 2023 | 13.30 – 15.00 WIB

TUJUAN

Audiensi ini bertujuan untuk:

1. Memperkenalkan Open Government Indonesia Kepada Kementerian PPPA
2. Menjelaskan Pelaksanaan Komitmen terkait Gender, Equity, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) dalam RAN OGI VII

PEMBAHASAN

1. **Ibu Maharani Wibowo**, selaku Point of Contact Sekretariat Open Government Indonesia memberikan pengantar sebagai berikut:
 - a. Sekretariat OGI telah melaksanakan serial meeting untuk membahas komitmen, dan telah mengundang dengan Kementerian PPPA. Namun, waktu itu Kementerian PPPA hanya pernah hadir sekali. Setelah itu, berdasarkan info yang diterima Sekretariat OGI, beberapa surat yang dikirimkan tidak sampai kepada Asisten Deputi yang terkait. Oleh karena itu, Sekretariat OGI mengajukan permohonan audiensi secara langsung agar dapat memperkenalkan OGI, RAN OGI, dan Komitmen berkaitan dengan lebih baik.
 - b. Open Government Indonesia (OGI) dibentuk sebagai bentuk partisipasi Indonesia dalam platform global Open Government Partnership (OGP). OGP merupakan organisasi multilateral yang mendorong pelaksanaan nilai-nilai keterbukaan pemerintah. Indonesia merupakan salah satu pendiri dari inisiatif tersebut pada tahun 2011, bersama dengan 7 negara lainnya. OGI mendorong nilai-nilai keterbukaan pemerintah, yaitu transparansi; partisipasi; akuntabilitas; inklusivitas; dan inovasi.
 - c. Indonesia telah menyusun tujuh rencana aksi (RAN OGI), dengan rencana aksi yang ketujuh telah diluncurkan oleh Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Terdapat enam isu strategis, yaitu anti-korupsi, ruang kewargaan dan demokrasi, pelayanan publik yang inklusif, akses keadilan, GEDSI, serta Energi, Lingkungan dan Sumber Daya Alam. Dalam keikutertaannya, Indonesia sudah menghasilkan berbagai penghargaan dari komitmen-komitmen yang ada di tingkat internasional.
 - d. Salah satu komitmen yang diangkat di dalam RAN OGI VII 2023-2024 adalah komitmen mengenai penguatan mekanisme pemulihan di bawah UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS (UU TPKS). Komitmen ini diangkat atas latar belakang tingginya kasus kekerasan seksual di Indonesia, dan kesulitan korban mengakses layanan pelaporan maupun pemulihan, serta penegakan hukum yang belum berperspektif pemulihan korban.
 - e. UU TPKS memandatkan 10 aturan turunan. Dalam RAN OGI VII, yang ingin didorong adalah penyusunan peraturan turunan mengenai Dana Bantuan Korban (DBK) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dengan pelibatan bermakna masyarakat sipil. Komitmen ini awalnya masuk karena OGI menerima proposal masukan dari dua CSO, yakni INFID dan IJRS. Kedua organisasi ini memiliki modalitas dan pengalaman riset di bidang tersebut, dan juga memiliki jaringan ke daerah, sehingga dapat memperkaya substansi dari peraturan turunan serta membantu sosialisasi. Riset INFID [dapat diakses melalui tautan berikut](#), dan riset IJRS [dapat diakses melalui tautan berikut](#).
 - f. Dalam Komitmen No. 14 RAN OGI VII terdapat tiga target, yaitu tersedianya peraturan turunan terkait UPTD PPPA, terlaksananya perbaikan tata kelola, dan tersusunnya peraturan turunan mengenai DBK. Selain Kementerian PPPA, K/L lain yang terlibat adalah LPSK dan Kumham.

2. **Ibu Mutia Rini** selaku JF Muda dari Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian PPPA, memberikan tanggapan berikut:
Kementerian PPPA sedang menyusun draft peraturan turunan, serta telah melaksanakan FGD dengan Kementerian/Lembaga terkait. Hari Senin akan ada pembahasan dengan CSO, salah satunya HWDI dilibatkan.
3. **Bapak Agus Wira** selaku JF Madya dari Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian PPPA, menginformasikan hal sebagai berikut:
 - a. UU TPKS memang mengamankan 10 peraturan turunan, tetapi sudah disimplifikasi menjadi 7, yaitu 3 PP dan 4 Perpres. Peraturan turunan tersebut terkait:
 - i. Dana bantuan korban
 - ii. Rancangan PP pencegahan tindak pidana kekerasan seksual (penangan, dan perlindungan korban – inisiasi dari KPPPA)
 - iii. PP Koordinasi dan Pemantauan penanganan TPKS
 - iv. Perpres penyelenggaraan Unit Pelayanan Terpadu Pusat
 - v. Perpres UPTD PPPA Daerah
 - vi. Perpres terkait pendidikan dan pelatihan terpadu untuk APH
 - vii. Rancangan peraturan detail terkait kebijakan nasional
 - b. Kementerian PPPA sendiri menargetkan peraturan-peraturan turunan yang dimandatkan kepada Kementerian PPPA bisa selesai di pertengahan 2023.
 - c. Kemarin telah rapat di KSP terkait dengan peraturan turunan UU TPKS, juga mengundang CSO. CSO memberikan masukan terkait turunan peraturan perundang-undangan.
4. **Bapak Supriyadi** selaku JF Madya dari Kementerian PPPA menyampaikan informasi sebagai berikut:
 - a. Menyambut baik inisiatif OGI. Kedepannya Musjak PHP dapat mengundang rekan-rekan CSO dan OGI dalam diskusi-diskusi untuk memperkaya substansi dari peraturan turunan UU TPKS.
 - b. Kementerian PPPA sudah mendorong Pemda membentuk UPTD PPA. Namun, memang SDM, koordinasi, dan pendanaan masih dapat ditingkatkan. UPTD PPA ini penting untuk dapat memberikan layanan satu atap bagi korban, yang tentu juga berperspektif korban.
 - c. Kementerian PPPA telah melakukan asesmen tentang layanan yang diberikan UPTD PPA, salah satunya di Jember. Saat ini, masih perlu integrasi lebih baik antar pemberi layanan bagi korban. Sudah ada layanan seperti unit PPA di Kepolisian, dll., namun belum satu atap.
 - d. Kami juga melihat perlu adanya penguatan SDM. APH juga perlu disosialisasikan tentang pentingnya berperspektif korban.
5. **Ibu Maharani Wibowo** memberikan tanggapan:
 - a. Harapannya dalam diskusi-diskusi Kementerian PPPA ke depan, dapat melibatkan rekan-rekan OMS, terutama INFID dan IJRS. Setnas OGI juga akan membantu menghubungkan Kementerian PPPA dengan OMS ini.
 - b. Apakah INFID dan IJRS perlu bersurat kepada Kementerian PPPA terkait RAN OGI dan kesediaan membantu?

6. **Ibu Mutia** memberikan tanggapan:
- Akan lebih baik jika bisa bersurat. Persuratan bisa ke e-office Kementerian PPPA, nanti akan dibagikan kontakannya. Namun nanti jika ada diskusi-diskusi Kementerian PPPA yang bisa melibatkan masyarakat sipil, Kementerian PPPA bisa mengundang INFID dan IJRS, mohon dapat dibagikan informasi kontakannya.
 - Kementerian PPPA sedang melakukan simulasi UPTD PPA di 3 daerah
 - Saat ini draf peraturan turunan mengenai UPTD PPA belum dapat dibagikan kepada publik.
7. **Bapak Supriyadi** memberikan tanggapan: masyarakat sipil atau publik bisa dilibatkan setelah PAK
8. **Ibu Maharani Wibowo** menjelaskan:
- Kementerian PPPA diharapkan dapat mengunggah data dukung ke situs Monev Kantor Staf Presiden setiap 6 bulan sekali sebagai salah satu stakeholder di RAN. Nanti aksesnya akan dibagikan kepada biro perencanaan Kementerian PPPA.
 - Target-target Kementerian PPPA yang dituangkan dalam matriks capaian sudah sesuai juga dengan hasil koordinasi dan diskusi dengan Direktorat terkait di Bappenas (Dit. Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga).

KESIMPULAN

Setnas OGI telah mengajukan audiensi dan memperkenalkan OGI serta RAN OGI VII kepada Kementerian PPPA yang teridentifikasi sebagai salah satu stakeholder terkait dalam proses penyusunan. Ke depannya, Kementerian PPPA diharapkan dapat melibatkan masyarakat sipil secara lebih luas dalam pembentukan peraturan turunan terkait UPTD PPA dan juga dalam perbaikan tata kelolanya, terutama INFID dan IJRS, yang sudah berpengalaman melakukan riset dalam bidang tersebut dan memiliki modalitas untuk melaksanakannya di periode 2023-2024. Setnas OGI akan mengundang Kementerian PPPA kembali dalam rapat lanjutan, dan memberikan informasi relevan lainnya (kontak INFID & IJRS, dokumen RAN, dll.) sebagai tindak lanjut.

